

BAB III

SOLUSI MENYELURUH

A. Agenda Kerjasama dan Kolaborasi

Beban untuk meningkatkan daya saing daerah, tidak dapat ditanggung hanya oleh salah satu stakeholder semata. Oleh karenanya, kerjasama dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait, baik antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri/usaha, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa intervensi direkomendasikan terhadap beberapa pilar IDSD yang belum optimal. Diharapkan kedepannya, intervensi-intervensi tersebut dapat menjadi katalis kerjasama dan kolaborasi antar stakeholder terkait sebagai bagian dari upaya-upaya Kabupaten Bintan dalam meningkatkan daya saingnya. Beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu meningkatkan akses publik terhadap infrastruktur transportasi dengan melakukan pembangunan serta perawatan jalan beraspal. Oleh karenanya, perlu adanya dorongan untuk memberikan prioritas pada program pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta perbaikan pengelolaan infrastruktur jalan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa/kelurahan.

2. Perekonomian Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu meningkatkan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Diharapkan dengan masuknya investasi, pertumbuhan ekonomi dapat terdorong, serta lapangan pekerjaan dapat dibuka bagi angkatan kerja di Kabupaten Bintan. Disamping investasi PMA dan PMDN, peningkatan pemberdayaan dan pembinaan UMKM juga perlu dilakukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu menciptakan iklim yang dapat merangsang tumbuhnya UMKM baru, misalnya dengan peningkatan dukungan pendanaan dari APBD untuk riset inovatif yang dibutuhkan oleh UKM, serta mendorong agar terbukanya komunikasi antara UKM dan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya. Diharapkan, melalui penelitian dan kajian dari akademisi, UKM dapat memanfaatkan inovasi serta teknologi tepat guna dalam kegiatan usahanya.

3. Pendidikan dan Keterampilan

Rasio penduduk Kabupaten Bintan yang menyelesaikan studi jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2018 (DIV/S1/S2/S3) hanya 3,92%, jika dibandingkan dengan rasio penduduk yang menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu 20,49%, ketimpangan jelas menjadi tantangan. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu mendorong minat penduduknya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sebagai modal sumber daya manusia bagi pembangunan kedepannya.

4. Ketenagakerjaan

Balai Latihan Kerja (BLK) berfungsi sebagai prasarana dan sarana tempat pelatihan bagi angkatan kerja untuk mendapatkan keterampilan atau bagi angkatan kerja yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing. Beberapa manfaat BLK antara lain adalah: dapat menjembatani angkatan kerja untuk mencari pekerjaan, memberikan pelatihan sesuai dengan kompetensi, serta dengan sendirinya meningkatkan kompetensi angkatan kerja itu sendiri.

Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu mendorong agar terbentuknya UPTD BLK Propinsi Kepulauan Riau untuk wilayah Kabupaten Bintan. Melalui UPTD BLK ini, adanya upaya-upaya untuk mencetak angkatan kerja kompeten, meningkatkan keahlian, serta profesionalisme angkatan kerja, dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Bintan.



5. Akses Keuangan

Perluasan akses keuangan masyarakat Kabupaten Bintan dapat dilakukan dengan meningkatkan penyaluran dan penyerapan KUR serta meningkatkan akses serta ketersediaan modal untuk pengembangan koperasi dan UMKM terutama pada sektor-sektor usaha baru seperti ekonomi kreatif dan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat. Disamping itu, peningkatan akses pinjaman atau pembiayaan kepada nelayan dan petani, juga diperlukan karena dapat mendorong peningkatan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.

6. Ukuran Pasar

Rendahnya nilai dimensi ukuran pasar dikarenakan oleh menurunnya nilai ekspor terhadap nilai impor, serta meningkatnya rasio ekspor terhadap impor. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu mendorong peningkatan nilai ekspor serta meningkatkan rasio nilai ekspor terhadap nilai impor.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: mendorong perluasan pasar tujuan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor non-tradisional; meningkatkan daya saing produk-produk ekspor; mengembangkan industri berorientasi ekspor; mengoptimalisasikan kawasan industri lokal; serta mempermudah pengurusan lisensi dan pengurusan perizinan ekspor impor di Kabupaten Bintan.

7. Kapasitas Inovasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu meningkatkan kapasitas inovasi daerah untuk menunjang pembangunan dengan meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga LITBANG, serta industri/dunia usahadalam pengembangan teknologi dan inovasi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan bagi pengembangan inovasi daerah adalah dengan mendorong terbangunnya industri berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD).



Melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi, industri/dunia usaha, dan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dapat membangun model pengembangan kluster inovasi berbasis PUD (masterplan model pengembangan kluster inovasi), meningkatkan kegiatan inovasi, penelitian, dan pengembangan berbasis PUD, serta mendorong komersialisasi inovasi yang dihasilkan oleh kolaborasi bersama perguruan tinggi dan/atau lembaga LITBANG untuk dimanfaatkan oleh industri/dunia usaha.

B. Resolusi Tahunan

Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melakukan beberapa penelitian dan pengkajian periode tahun 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Resolusi Tahunan Tahun Anggaran 2018-2019

Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran	OPD
Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan Bintan	2019	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyusunan Rencana Induk KELITBANGAN	2019	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	2019	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penelitian dampak pemberian bantuan terhadap peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya	Perubahan 2018	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kajian Strategi Optimalisasi Pemasaran Produk-Produk UMKM	Perubahan 2018	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kajian Strategi Pengembangan Kepariwisata Maritim Berbasis Masyarakat	Perubahan 2018	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: BAPELITBANG Kabupaten Bintan



C. Konektivitas Antar Lembaga dan Kewenangan Pemerintahan

Upaya untuk meningkatkan daya saing daerah, diperlukan strategi perencanaan pembangunan yang dapat melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kewenangan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menumbuh kembangkan pusat-pusat inovasi. Disamping peningkatan kerjasama secara regional dan nasional, koordinasi yang lebih baik ditingkat lokal antara pihak pemerintah daerah kabupaten, pelaku industri/usaha, akademisi, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil, juga diperlukan sebagai upaya peningkatan daya saing untuk membuka akses terhadap sumber daya, sains, teknologi, dan inovasi di daerah.